



**ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN STATUS KEWILAYAHAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR TAHUN 2024**

**Hamda El Ramadani Poetra**

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Riswanti Budi Sekaringsih**

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat: Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

[23108010124@student.uin-suka.ac.id](mailto:23108010124@student.uin-suka.ac.id)

***Abstract.** This study aims to analyze the effect of minimum wage, average years of schooling, and regional status on the number of poor people in the districts/cities of West Java, Central Java, and East Java in 2024. The data used is secondary cross-section data obtained from relevant agencies. The analysis method used is multiple linear regression with an OLS approach logarithmic form and classical assumption testing. The results show that the minimum wage and regional status variables have a significant positive effect on the number of poor people while the average years of schooling variable has a significant negative effect. A robust model was used to overcome the heteroscedasticity problem detected in the model. The findings corroborate that education, regional characteristics, and minimum wage determine the poverty rate.*

***Keywords:** Average Years of Schooling ; Minimum Wage; Poverty ; Regional Status*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, rata-rata lama sekolah, dan status kewilayahan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada tahun 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder cross-section yang didapat dari instansi terkait. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan OLS dan bentuk logaritmik serta pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel upah minimum dan status kewilayahan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin sedangkan variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan. Model robust digunakan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas yang terdeteksi dalam model. Temuan ini menguatkan bahwa faktor pendidikan, karakteristik wilayah serta upah minimum sangat menentukan tingkat kemiskinan

**Kata Kunci :** Kemiskinan ; Rata-rata Lama Sekolah ; Status Kewilayahan ; Upah Minimum

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah salah satu fenomena yang masih menjadi perhatian dan menjadi tantangan oleh negara maju maupun negara berkembang. Salah satu bukti perhatian berbagai negara terhadap fenomena ini adalah dengan memasukkan tujuan pengentasan kemiskinan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGS (*Sustainable Development Goals*) yang diharapkan bisa tercapai ditahun 2030. Menurut (BPS 2024) Indonesia memiliki jumlah

penduduk miskin cukup tinggi yaitu sebesar 25.219 juta jiwa yang tersebar di berbagai provinsi. Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi standar kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Dinayanti Ely et al., 2018). Di sisi lain, kemiskinan juga menjadi sebuah fenomena yang cukup kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan tetapi juga erat kaitannya dengan tingkat pendapatan yang didapatkan. Menurut (Rosana, 2019) Kemiskinan terjadi karena kesulitan dan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ditambah dengan sulitnya mendapatkan penghasilan yang layak, akibatnya kehidupan masyarakat akan menjadi sulit dalam memperoleh akses terhadap teknologi dan pendidikan yang bisa berujung pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Secara umum Konsep kemiskinan dibagi menjadi dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. (Dinayanti Ely et al., 2018).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi jumlah kemiskinan adalah Upah minimum. Tingkat upah bisa mempengaruhi kemiskinan karena upah adalah sumber penghasilan, apabila sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga pasti akan turun atau tetap, hal ini juga pasti akan mempengaruhi kepada tingkat kemiskinan (Ningrum Shinta, 2017). Upah minimum yang tidak sesuai dengan meningkatnya nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) disuatu daerah maka akan berdampak pada jumlah kemiskinan di daerah tersebut (Adella Yulia, 2021). Dalam dunia kerja, sektor pekerjaan dibagi menjadi dua yaitu sektor formal dan informal, keduanya memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun dalam praktiknya sektor informal lebih mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dibanding dengan sektor formal, hal ini bisa disebabkan oleh sifat sektor informal yang lebih mudah diakses banyak orang walaupun dalam segi organisasi kurang terstruktur.

Selain faktor upah minimum, tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pendidikan adalah sebuah sarana yang bisa digunakan untuk meningkatkan kependanaan (kualitas) sumber daya manusia disebuah negara. (Chairunnisa et al. 2022) Pendidikan bisa membuat seseorang mampu membuat pilihannya sendiri dalam hidupnya. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti juga memiliki produktivitas yang tinggi pula, maka hal tersebut dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh (Mankiw 1992) yaitu apabila investasi pendidikan dilakukan secara merata, termasuk pada masyarakat yang berpenghasilan rendah maka kemiskinan akan berkurang. Kualitas pendidikan yang baik akan bisa memberikan dampak bagi masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendidikan dalam hal ini dilihat dengan rata-rata lama sekolah (RLS). Dengan RLS ini bisa menggambarkan jumlah tahun penduduk dalam mengenyam pendidikan formal.

Kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh status kewilayahan daerah tersebut, apakah daerah tersebut merupakan kabupaten atau kota. Dengan status tersebut dapat dilihat ada beberapa tingkat perbedaan seperti infrastruktur, akses pendidikan dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara umum wilayah kota memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pendidikan, dan peluang kerja dibanding dengan wilayah kabupaten, maka hal ini bisa berdampak pada perbedaan tingkat kemiskinan antar kedua wilayah tersebut (Rifqi & Muchlisoh, 2021). Data menunjukkan bahwa secara presentase jumlah penduduk miskin di wilayah kabupaten lebih tinggi daripada wilayah kota (BPS INDONESIA, 2024). Untuk itu kita dapat melihat pengaruh variabel

# ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN STATUS KEWILAYAHAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR TAHUN 2024.

status kewilayaan terhadap jumlah kemiskinan, khususnya di 3 provinsi utama di pulau Jawa. Dengan memperlakukan variabel status kewilayaan sebagai variabel dummy (1= kabupaten, 0 = kota) maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut secara statistik berdampak pada jumlah miskin.

Berdasarkan penjelasan diatas, ketiga variabel independen yang digunakan ternyata masing – masing variabel tersebut memiliki keterkaitan yang relevan terhadap jumlah penduduk miskin baik secara positif maupun negatif. Selain itu dilihat dari variabel variabel yang digunakan, pada beberapa penelitian terdahulu masih belum banyak yang membahas lebih spesifik tentang keterkaitan antara Upah minimum, rata rata lama sekolah dan status kewilayaan (kabupaten/kota) terhadap jumlah penduduk miskin diberbagai kabupaten/kota pada pulau jawa, khususnya di 3 provinsi utama yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Padahal pulau Jawa sendiri menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional, namun pada realitanya lebih dari setengah jumlah kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi di pulau jawa. Maka dari itu melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk menyusun kebijakan yang lebih merata dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

## KAJIAN TEORITIS

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan minimal hidupnya Secara garis besar definisi miskin dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer yaitu berupa tidak memiliki sebuah aset atau harta, pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial serta sumber sumber informasi (Deswita Sari et al. 2023). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi multidimensional yang tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga kurang mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan.

Menurut mudrajat kuncoro dalam bukunya (Kuncoro, 2006), menyebutkan bahwa ada tiga penyebab kemiskinan pada sisi ekonomi, yaitu Pertama kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam sumber daya manusia, apabila kualitas sumber daya manusianya rendah berarti produktivitasnya juga rendah yang pada akhirnya berakibat pada tingkat upahnya yang rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam kepemilikan modal yang membuat kelompok miskin sulit keluar dari keterbatasan ekonomi. Dimana ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan

### **Upah Minimum**

Upah minimum adalah suatu batas terendah upah yang harus dibayarkan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Biasanya upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak pada daerah tersebut, dengan adanya upah minimum ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upah merupakan sumber pemasukan bagi para tenaga kerja sehingga apabila sumber pemasukan turun maka akan berpengaruh pada kesejahteraan tenaga kerja (Hanifah siti et al. 2021).

Dalam (UU No 13 Tahun 2003) tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dengan demikian kebijakan upah minimum ini adalah salah satu strategi pemerintah dalam membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviana et al.1) bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan pada kemiskinan yang berarti bahwa semakin tinggi upah minimum maka akan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh pada kesejahteraan yang meningkat. Namun, penelitian oleh (Syahputri & Fisabilillah, 2022) menyebutkan bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan pada kemiskinan sehingga apabila upah minimum meningkat justru kemiskinan juga akan meningkat.

### **Rata – Rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator statistik yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, baik yang telah diselesaikan maupun belum. Tingginya rata-rata lama sekolah menunjukkan banyaknya jumlah tahun standar dalam menamatkan pendidikan seseorang Jadi dengan adanya indikator ini kita bisa melihat kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Tingkat pendidikan bisa digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di sebuah wilayah, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya (Hasanah et al., 2021) . Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Schult, 1961) tentang investasi sumber daya manusia, menyebutkan bahwa investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif, sehingga menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan. Meningkatnya sumber daya manusia akan berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan.

### **Status Kewilayahan**

Status kewilayahan seperti kabupaten dan kota memiliki pengaruh ke beberapa sektor seperti akses ke pendidikan, infrastuktur dan pertumbuhan ekonomi, hal ini bisa menjadi salah satu penyebab kemiskinan di sebuah wilayah. Menurut (Restuhadi et al., 2021), tingkat dan sebaran kemiskinan yang bervariasi dari tiap tiap wilayah di Indonesia pada dasarnya merupakan refleksi dari keterbatasan penduduk di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekalipun pada tingkatan standar.

Peraturan pemerintah No 59 (2022) tentang perkotaan menjelaskan bahwa Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Kota cenderung memiliki tingkat urbanisasi dan infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan kabupaten, karena dengan infrastruktur yang baik maka akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zamhari et al., 2015), menyebutkan bahwa kemiskinan di suatu wilayah disebabkan oleh karakteristik geografis wilayah tersebut, seperti contoh tingkat kemiskinan akan tinggi pada wilayah dengan ciri seperti daerah terpencil dan keterbelakangan.

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN  
STATUS KEWILAYAHAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR  
TAHUN 2024.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi instansi terkait. Data yang digunakan meliputi upah minimum, rata-rata lama sekolah, status kewilayahan sebagai variabel Independen dan jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan adalah data cross-section yang mencakup 100 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda (Ordinary Least Squares/OLS) dan regresi dengan bentuk logaritmik (logarithmic functional forms) melalui aplikasi Stata 14. Model OLS digunakan untuk melihat pengaruh langsung variabel independen terhadap jumlah penduduk miskin, sementara model logaritmik digunakan untuk mengukur pengaruh persentase perubahan upah minimum terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Untuk menguji kelayakan dan signifikansi model, dilakukan beberapa pengujian statistik yaitu uji t, uji, serta koefisien determinasi ( $R^2$ ). Uji asumsi klasik juga dilakukan, meliputi uji normalitas residual dengan Skewness-Kurtosis test, uji multikolinearitas menggunakan nilai Variance Inflation Factor ( $VIF < 10$ ), serta uji heteroskedastisitas dengan Breusch-Pagan test, dimana ketiganya diharapkan memenuhi nilai signifikansi ( $p\text{-value} > 0,05$ ) agar model layak digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Untuk uji Normalitas terdapat berbagai metode yang bisa digunakan untuk melihat apakah data yang dimiliki terdistribusi normal atau tidak, syarat yang harus terpenuhi adalah nilai ( $\text{sig} > 0,05$ ). Berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan nilai  $0.4158 > 0,05$  sehingga bisa disimpulkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel independen, biasanya bisa dideteksi dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*), apabila nilai  $VIF < 10$  maka bisa diketahui bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai Upah minimum (0,795398), rata – rata lama sekolah (0,310266), dan status wilayah (0,356825). Maka disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Pada Uji Heteroskedastisitas kali ini metode yang dipakai yaitu *Breusch-Pagan test*, yang digunakan untuk mengetahui apakah varian residual bersifat konstan atau tidak. Berdasarkan hasil uji *Breusch-Pagan test* nilai probability Chi Squared yaitu  $0,0008 < 0,05$  sehingga bisa disimpulkan terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model ini. Maka dari itu untuk mengatasi gejala ini maka model akan diestimasi menggunakan metode *robust standard error* guna mendapatkan hasil yang tetap valid walaupun terdapat gejala heterosketasriditas

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi**

Variabel	Coef.	Robust Std. Err	t - statistik	P >  t
Constan	1895.696	48.90665	0,186111	0,000

umr	0.000038	0.00000960	3,96	0,000
rls	-25.08114	4.990485	-5,03	0,000
Stawil	45.44364	15.2141	2,99	0,004
l_umr	1.406571	0.2616847	5,38	0,000
R – Squared	Model 1 (0,5095)		Model 2 (0,6984)	
F – Statistik	Model 1 (45,22)		Model 2 (48,33)	

Sumber : Hasil olah data stata 14

Dari tabel 1, kita bisa dapatkan model regresi *Ordinary Least Squares* (OLS) dan (*logarithmic functional forms*), sebagai berikut :

1. *Ordinary Least Squares* (OLS)

$$MSKN = 189,5696 + 0,000038 (\text{umr}) + -25,08114 (\text{rls}) + 45,44364 (\text{stawil}) + \epsilon$$

2. (*logarithmic functional forms*)

$$\ln MSKN = -15,31816 + 1.406571 (\ln \text{umr}) + -0,2254503 (\text{rls}) + 1,163056 (\text{stawil}) + \epsilon$$

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil regresi pada model pertama maka diperoleh nilai R – Squared sebesar 0,5095, yang berarti bahwa sekitar 50,95% variasi jumlah penduduk miskin antar kabupaten/kota pada 100 sampel bisa dijelaskan oleh model ini sedangkan sisanya dijelaskan oleh model lain. Pada Model kedua kita menggunakan regresi Lin-Log, dengan transformasi logaritmik pada variabel dependen (ln(mskn)) dan salah satu variabel independen (ln(umr)). Hasilnya untuk model kedua ini memiliki R-squared sebesar 0.6984, yang artinya bahwa sekitar 69,84% variasi dalam log jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel – variabel dalam model ini.

#### Uji F

Dari hasil Uji F kita bisa dapatkan bahwa pada model pertama nilai F – Statistic sebesar 45,22 dengan prob > F = 0,0000, dengan demikian bermakna bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Untuk hasil Uji F pada model kedua kita juga peroleh nilai F statistic sebesar 48,33 dengan Prob > F = 0.0000, hal ini menunjukkan bahwa untuk model kedua ini juga signifikan secara keseluruhan.

#### Uji t

Dari hasil uji t pada model pertama dan model kedua memperlihatkan bahwa variabel umr ( upah minimum ) , variabel rls ( rata – rata lama sekolah ), variabel stawil (status kewilayahan), serta variabel l\_umr semuanya memiliki probabilitas kurang dari 0,05 ( < 0,05 ) maka H1 diterima sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel umr, rls, stawil, dan l\_umr masing masing berpengaruh secara sparsial terhadap kemiskinan

#### Pengaruh Upah minimum terhadap kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model pertama upah minimum memberikan pengaruh positif serta signifikan pada kemiskinan di tiga provinsi tersebut. Dengan memiliki

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN  
STATUS KEWILAYAHAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR  
TAHUN 2024.

koefisien sebesar 0,000038 dan signifikan secara statistik ( $p\text{-value} = 0.000 < 0.05$ ), maka memiliki arti bahwa setiap kenaikan upah minimum sebesar Rp 1000.000 maka akan menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin sekitar 38 orang. Pada model kedua Variabel logaritma upah minimum ( $l\_umr$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap logaritma jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar 1.406571 dan  $p\text{-value}$  0.000. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan upah minimum sebesar 1% akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,41%.

Peningkatan upah minimum tidak selalu diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin, adanya peningkatan upah minimum ini juga mengakibatkan pada peningkatan pengeluaran perusahaan sehingga juga bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang dirasa kurang produktif. Hal ini mungkin juga dapat dijelaskan karena kenaikan upah ini hanya dirasakan oleh para pekerja formal sedangkan sebagian besar para pekerja berada di sektor informal yang tidak terdampak kebijakan ini

#### **Pengaruh rata – rata lama sekolah terhadap kemiskinan**

Hasil penelitian mengatakan bahwa variabel  $rls$  berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di tiga provinsi tersebut. Dengan koefisien -25.08114 dan tingkat signifikansi tinggi ( $p\text{-value} = 0.000 < 0.05$ ), yang berarti bahwa setiap adanya tambahan 1 tahun pada tingkat pendidikan pada suatu wilayah maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 25 orang. Adanya peningkatan satu tingkat pendidikan akan menyebabkan seseorang memiliki peluang yang semakin terbuka untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai karena ada peningkatan kualitas pada orang tersebut, al hasil akan juga berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan secara berkala.

#### **Pengaruh status kewilayahan terhadap kemiskinan**

Variabel  $stawi$  merupakan variabel dummy yang merepresentasikan status kewilayahan, di mana nilai 1 menunjukkan kabupaten dan 0 menunjukkan kota. Hasil penelitian kali ini memperlihatkan bahwa variabel status kewilayahan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien regresi untuk variabel ini sebesar 45,44364 dan signifikan secara statistik ( $p\text{-value} = 0.000 < 0.05$ ). Hal ini dapat menjelaskan bahwa wilayah kabupaten memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak sekitar 45 jiwa dibanding wilayah kota. Karena pada umumnya wilayah kabupaten memiliki akses yang lebih terbatas terhadap infrastruktur, akses pendidikan, lapangan kerja formal dibanding dengan wilayah kota sehingga menyebabkan kabupaten cenderung lebih tertinggal dalam kesejahteraan sosial

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis OLS (Ordinary Least Squares) dan model logaritmik (Lin-Log) pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel upah minimum, rata – rata lama sekolah dan status kewilayahan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada tahun 2024. Secara spesifik, variabel upah minimum dan status wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan kenaikan upah minimum tiap daerah tidak berdampak pada pengentasan kemiskinan, hal ini juga perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial yang merata agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah kabupaten/kota. Namun untuk variabel rata – rata lama sekola berpengaruh negatif signifikan yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat

pendidikan masyarakat maka akan meningkatkan kualitas hidup sehingga bisa menyebabkan turunnya jumlah penduduk miskin yang ada. Menariknya dari kedua model yang digunakan, **model** Lin-Log memiliki nilai koefisien determinasi lebih tinggi ( $R^2 = 0.6984$ ), dibandingkan model OLS (Adjusted  $R^2 = 0.5095$ ), yang menunjukkan bahwa model Lin-Log lebih mampu menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin. Hasil ini menguatkan bahwa faktor pendidikan, karakteristik wilayah serta upah minimum sangat menentukan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di tiga provinsi ini harus memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur dan akses ekonomi secara merata.

## DAFTAR REFERENSI

- Adella Yulia. (2021). PENGARUH UPAH MINIMUM TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Equilibrium*, 10(2), 121–130.
- BPS INDONESIA. (2024). *Jumlah Kemiskinan Menurut Kabupaten\_Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*. <http://bps.go.id/id/statistics-table/2/NjI0IzI=/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>
- Chairunnisa Nurlaila Maysaroh, & Qintharah Yuha Nadhirah. (2022). PENGARUH KESEHATAN,TINGKAT PENDIDIKAN, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN PADA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2020. *Jurnal PETA*.
- Deswita Sari, P., & Sultan Ageng Tirtayasa Deris Desmawan, U. (2023). PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP TINGKAT PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA 2020 Saniya Najla. In *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* (Vol. 1, Issue 1).
- Dinayanti Ely, Nanga Muana, Miswari Fisca, Rismalasari Maudyatia, Hafid Muhammad, Wahyu Raditia, Kartika Vidya, widaryato, Raisa Riski, fitrinika Ester, & Rahayuningsih Dwi. (2018). *Analisis wilayah dengan kemiskinan tinggi* (Edisi pertama). Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Hanifah siti, & Hanifa Nurul. (2021). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMONGAN. *Journal Of Economics*, 1, 191–206.
- Hasanah, R., Syaparuddin, & Rosmeli. (2021). Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 2303–1255.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UUP STIM YKPN.
- Mankiw george, Romer David, & Davis N Weil. (1992). *A Contribution to The Empirics of the Economic Growth*. Quarterly Journal of Economics.
- Ningrum Shinta. (2017). ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN STATUS KEWILAYAHAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR TAHUN 2024.

- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM KABUPATEN, DAN PENGANGGURAN, TERHADAP KEMISKINANDI KABUPATEN MADIUN. *Syntax Idea*, 3(5), 1034. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1183>
- Peraturan pemerintah. (2022). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PERKOTAAN*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234930/pp-no-59-tahun-2022>
- Restuhadi, F., Hadi Syaiful, & Rosalinda. (2021). ANALISIS POLA PENYEBARAN KEMISKINAN KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA. *Jurnal Agribisnis*, 23(1).
- Rifqi, M., & Muchlisoh, S. (2021). *Determinan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 Menggunakan Spatial Error Model dengan pendekatan Fixed Effect*.
- Rosana, E. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 19–34. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4483>
- Schult, T. (1961). Investment in Human Capital. *American Economic Association*, 51(1), 1–17.
- Syahputri, R., & Fisabilillah, L. W. (2022). PENGARUH PENGANGGURAN, UPAH MINIMUM, DAN PDRB TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Journal Of Economics*, 2(2), 169–184. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- UU No 13. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*.
- Zamhari, J., Wisadirana, D., & Kanto, S. (2015). *Analisis Determinan Kemiskinan di Jawa Timur*. 18(1).